

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan dilakukan oleh semua negara, baik dalam struktur ekonomi maupun dalam bidang infrastruktur terus mengalami kemajuan, masing-masing negara saling bersaing satu sama lain dalam mengembangkan hal-hal tersebut. Todaro mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang didalamnya terdapat perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga terdapat pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan memberantas kemiskinan. Karena terdapat proses pembangunan di masing-masing daerah akan menimbulkan ketidakmerataan, oleh sebab itu di perlukannya pembenahan dalam membuat suatu kebijakan agar ketimerataan disetiap daerah dapat menurun (Syafrizal, 2012).

Kesejahteraan menjadi ukuran kemajuan dan kemakmuran di setiap negara atau daerah. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu tercapainya kesejahteraan ekonomi, karena dasar itulah setiap kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan strategi dan perencanaan yang baik dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi. Bukan hanya itu namun terdapat indikator selain pertumbuhan ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan pendapatan bukan masalah yang hanya dialami oleh negara berkembang saja , tetapi masalah ketimpangan pendapatan ini tidak bisa terlepas oleh negara maju sekalipun. Perbedaannya terdapat pada proposi atau besar kecilnya ketimpangan itu terjadi, serta solusi dan tingkat kesulitan yang dialami. Kondisi distribusi pendapatan di masing-masing negara di bagi menjadi dua gambaran yaitu distribusi pendapatan relative dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk yang menerima pendapatan menengah dan 20 persen penduduk yang memiliki pendapatan paling tinggi. Sedangkan distribusi pendapatan yang mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang. (Sukirno, 2006)

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu keadaan dimana menjelaskan perbedaan kemakmuran ,standar hidup dan pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau punrumah tang dalam masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakmerataan distribusi disetiap wilayah yang disebabkan oleh bebapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dikendalikan, meledaknya laju urbanisasi ,dan lain-lain. permasalahan ketimpangan pendapatan juga allah SWT jelaskan dalam firmanNya pada surat Al-Hasyr ayat 7 :

يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَقَاءَ مَا  
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولِ أَنْتُمْ وَمَا مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ

Artinya :” Harta rampasan perang (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang ada dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.”

Makna ayat diatas yaitu bahwa di islam telah mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak hanya diberikan untuk golongan yang kaya saja. Untuk mencapai pemerataan pada seluruh masyarakat, di islamkan mengutamakan perlunya membaikan kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, shodaqoh, mengeluarkan infak, dan adanya hukum wasiat, warisan dan hibah. Aturan ini diberlakukan kekayaan pada satu golongan saja namun bisa dirasakan oleh golongan yang lain. Hal ini menjadi suatu pembelajaran tentang harta secara benar dan tepat sasaran dalam mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat.

Badan pusat statistik (BPS) dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi diantara masyarakat dapat dilihat dengan indeks gini (gini ratio). Terdapat kisaran dalam indeks gini yaitu 0 - 1. Apabila angka indeks gini mendekati 0 maka dapat dinyatakan ketimpangan yang terjadi semakin rendah (merata), namun jika indeks gini mendekati angka 1 maka dapat dinyatakan ketimpangan yang terjadi di masyarakat semakin melebar atau tinggi

**Table 1.1**  
**Gini Ratio Menurut Provinsi DI Pulau Sumatera**

PROVINSI	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	0.336	0.331	0.336	0.377	0.329	0.321	0.32
Sumatera Utara	0.341	0.315	0.331	0.315	0.325	0.314	0.317
Sumatera Barat	0.357	0.333	0.33	0.321	0.315	0.313	0.308
Riau	0.383	0.366	0.365	0.347	0.325	0.337	0.33
Jambi	0.337	0.335	0.352	0.347	0.334	0.344	0.322
Sumatera Selatan	0.379	0.39	0.347	0.355	0.363	0.349	0.334
Bengkulu	0.379	0.355	0.373	0.355	0.35	0.358	0.334
Lampung	0.356	0.339	0.364	0.361	0.333	0.336	0.33
Kepulauan Riau	0.371	0.419	0.351	0.353	0.346	0.334	0.338
kepulauan bangka	0.31	0.299	0.279	0.281	0.279	0.276	0.266

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan di pulau sumatera dari tahun ke tahunnya terus mengalami penurunan dalam rentang waktu 2013-2019. Berdasarkan pada tabel diatas sumatera barat merupakan provinsi kedua terendah pada tahun 2019 setelah provinsi kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,266, Dikuti oleh sumatera utara sebesar 0,317. Aceh sebesar 0,320, jambi sebesar 3,22, lampung sebesar 0,330, sumatera selatan sebesar 0,344, Bengkulu sebesar 0,334, dan kepulauan riau sebesar 0,338.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu pada setiap daerah selalu menargetkan laju pertumbuhan yang tinggi dalam perencanaannya dan tujuan pembangunan untuk daerahnya. Sederhananya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan dari PDRB ditingkat daerah dan pdb dalam tingkat nasional dari tahun ke tahun. Suatu dapat

dikatakan mengalami perubahan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari apa yang pernah dicapai di tahun sebelumnya. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu individu atau masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesejateranya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan pemerataan dalam distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan produk domestik regional boruto (PDRB) dan laju perumbuhannya atas dasar harga konstan (Lili Masli, 2008). Pertumbuhan yang terlalu cepat akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini karena tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur tingkat pertumbuhan laju penduduk. Secara sederhana, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada produk domestik boruto (gross domestic product) pada suatu negara. Untuk daerah makna pembangunan di utamakan untuk meningkatkan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota (kuncoro, 2004).

**Tabel 1.2**

**Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga konstan menurut provinsi sumatera barat**

tahun	laju pertumbuhan pdrb	pdrb (ribu rupiah)
2019	5,05	31 669,59
2018	5,16	30 477,76
2017	5,30	29 310,69
2016	5,27	28 164,93
2015	5,53	27 044,14
2014	5,88	25 982,83

*Sumber : BPS Sumatera Barat 2014-2019*

Berdasarkan pada table 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalaminya kenaikan terus menerus pertahunnya dalam angka yang cukup bagus. Namun tidak di barengi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kemerosotan tiap tahunnya, meskipun penurunannya dalam tingkat yang wajar dan masih dalam kondisi signifikan ,tetapi diperlukannya sebuah strategi dan rencana untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi tetap dalam garis yang wajar dan terkendali.

Tingkat laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat terus mengalami kemerosotan tiap tahunnya , terbatasnya pertumbuhan ekonomi bersumber dari perlambatan pertumbuhan tiga sektor penopang sentral, yaitu sektor kehutanan dan perikanan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan besar-eceran serta sektor transportasi dan pergudangan. Meskipun terjadi perlambatan pada sektor penopang sentral, perkonomian provinsi sumatera barat dapat di dorong oleh aklerasi pertumbuhan dalam sektor keuangan, sektor konstruksi juga sektor pendidikan.

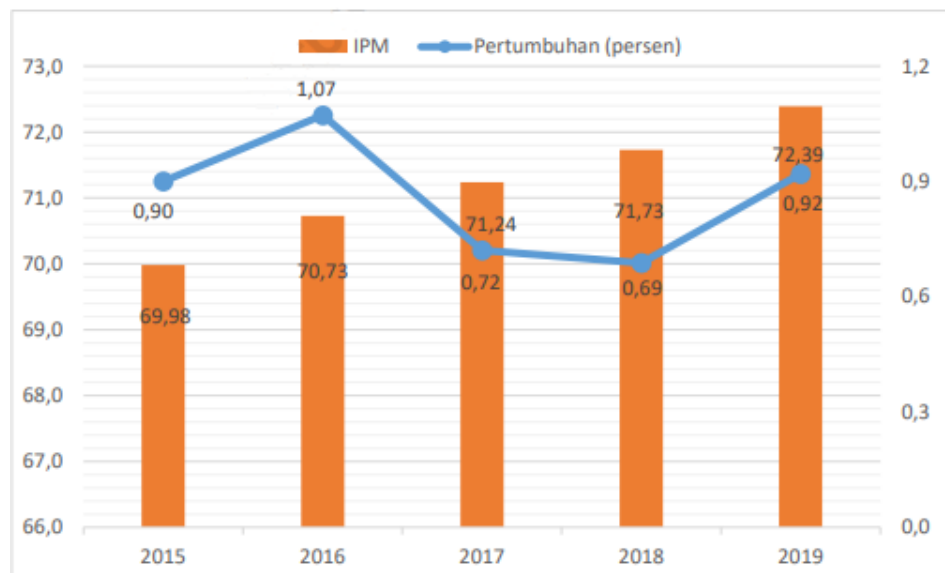
Pembangunan ekonomi dapat diartikan berhasil apabila daerah/wilayah dapat membuat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau lebih sering disebut dengan indeks pembangun manusia (IPM). Disuatu daerah yang IPMnya tidak merata dapat mengakibatkan daerah yang IPMnya tinggi akan memiliki kualitas manusia yang lebih baik serta menunjang pembangunan dalam segala sektor. Menurut todaro (2011) menjelaskan *Human Developmant Indeks* (HDI) atau IPM yaitu indeks yang mengukur pencapaian

manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan riil yang disesuaikan. Atau bisa dikatakan IPM yang tinggi dapat mengurangi ketidalmereataan dalam masyarakat.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki indeks pembangunan manusia berkaitan sangat erat dengan adanya ketimpangan pendapatan. Rendahnya IPM dapat menyebabkan produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat akan mengalami penurunan dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan dan sebaliknya (Pradnyadewi dan Purbhadharmaja, 2017).

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019**



*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020*

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan IPM Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 72,39. Angka IPM dihitung dari tiga dimensi, yaitu umur yang panjang dan hidup yang sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi umur yang panjang dan hidup yang sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lain. Sedangkan pendidikan diwakili dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan manusia di suatu wilayah. IPM di Sumatera Barat dari durasi tahun 2015-2019 selalu mengalami pertumbuhan rata-rata 0,86 persen per tahun. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, pencapaian IPM di Sumatera Barat sudah mencapai 72,39, yang dimana itu merupakan pencapaian tertinggi provinsi Sumatera Barat, diikuti tahun 2018 sebesar 71,73, tahun 2017 sebesar 71,24, tahun 2016 sebesar 70,73, dan tahun 2015 sebesar 69,98.

Menurut Sukirno (2016) bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah seperti pemerataan pendapatan. Tingginya jumlah penduduk dapat menyebabkan jurang golongan masyarakat yang sudah ada dan menjadi bertambah meluas. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan angka ketimpangan suatu wilayah menjadi meningkat.



**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk (ribu jiwa) Di Pulau Sumatera Tahun 2014-2019**

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	5.018,7	5.094,5	5.169,4	5.243,4	5.316,3
Sumatera Utara	13.961,4	14.136,8	14.308,4	14.476,0	14.639,4
Sumatera Barat	5.200,9	5.272,5	5.342,8	5.411,8	5.479,5
Riau	6.356,7	6.478,4	6.598,7	6.717,6	6.835,1
Jambi	3.403,9	3.445,9	3.487,0	3.527,1	3.566,2
Sumatera Selatan	8.062,7	8.174,1	8.283,8	8.391,5	8.497,2
Bengkulu	1.875,9	1.900,7	1.924,9	1.948,6	1.971,8
Lampung	8.123,0	8.210,3	8.295,3	8.377,7	8.457,6
Kepulauan Riau	1.982,8	2.045,3	2.109,4	2.174,8	2.241,6
kepulauan bangka b.	1.432,1	1.451,1	1.469,8	1.432,1	1.451,1

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020*

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk di provinsi Sumatera Barat terus mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya masih bisa dikatakan dalam batas wajar di bandingkan dengan daerah-daerah yang lain, namun tentu hal itu tidak boleh dianggap remeh dikarenakan jumlah penduduk yang usianya sudah lanjut terpaut jauh dengan jumlah penduduk yang usianya masih di bawah 15 tahun. Maka diperlukan rencana dan strategi yang lebih tertata agar dapat menuntaskan jumlah penduduk yang tinggi.

Sumatera Barat ada pada posisi ke lima dengan penduduk terbanyak di pulau Sumatera pada tahun 2019, Sumatera Utara pada posisi pertama sebanyak 14.639 jiwa, diikuti Sumatera Selatan sebanyak 8.497,5 jiwa, Lampung sebanyak 8.457,6 jiwa, Riau sebanyak 6.853,1 jiwa, Sumatera Barat sebanyak 5.479,5 jiwa, Aceh sebanyak

5.316,3 jiwa, Jambi sebanyak 3.566,2 jiwa, Kepulauan Riau sebanyak 2.241,6 jiwa, Bengkulu 1.971,8 jiwa, dan yang terakhir Kepulauan Bangka Belitung 1.451,1 jiwa.

Masalah kependudukan yang sering terjadi di provinsi Sumatera Barat yaitu angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, partisipasi dan lama sekolah rendah, kemiskinan dan pengangguran diatas rata-rata, dan persebaran penduduk yang belum rata di setiap daerah. Diharapkan pemerintah memiliki berbagai upaya untuk menentaskan masalah-masalah yang terjadi agar tidak menjadi gangguan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur kedepannya di Provinsi Sumatera Barat.

PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB naik, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa dalam unit ekonomi disuatu wilayah/daerah mengalami peningkatan. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Arthur lewis, semua sektor dalam ekonomi harus tumbuh secara bersamaan untuk keseimbangan yang tepat sasaran antara pertanian dan industri, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memindahkan tenaga kerja yang berlebih dalam sektor pertanian ke sektor industri. Dalam kondisi tersebut, peran dari pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sektor-sektor lain (M.L.Jhingan, 2010).

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota Di**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019**

Kab/Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
Kab.Kep.Mentawai	77,95	74,72	82,77
Kab.Pesisir Selatan	64,03	66,60	68,48
Kab.Solok	67,50	68,10	70,60
Kab.Sijunjung	68,21	68,17	69,90
Kab.Tanah Datar	66,51	68,90	69,13
Kab.Padang Pariaman	64,12	65,27	62,88
Kab.Agam	66,07	68,30	69,39
Kab.Lima Puluh Kota	72,63	72,86	72,94
Kab.Pasaman	70,63	66,82	70,58
Kab.Solok Selatan	69,19	74,64	72,12
Kab.Dharmasraya	64,53	68,37	70,17
Kab.Pasaman Barat	68,63	66,75	65,40
Kota Padang	61,15	62,25	61,45
Kota Solok	66,29	64,07	61,83
Kota Sawahlunto	70,44	72,63	69,20
Kota Padang Panjang	64,17	65,35	68,35
Kota Bukittinggi	65,23	68,63	65,02
Kota Payakumbuh	71,42	70,49	68,06
Kota Pariaman	65,20	66,65	68,95

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2020*

Berdasarkan pada tabel 1.4 menunjukkan TPAK pada tahun 2017-2019 di kabupaten/kota di provinsi Sumatera barat mengalami fluktuasi. Menurut TPAK pada tahun 2019 tertinggi yaitu pada kabupaten Mentawai sebesar 82,77% dan terendah yaitu pada kota Padang sebesar 61,45%. Analisis angkatan kerja dalam kaitanya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntunan yang memperoleh pendapatan antara kelompok penduduk. pembangunan yang penting untuk membuat pertumbuhan

ekonomi daerah mengalami peningkatan selain dari keuangan daerah adalah sumber daya manusia. Partispasi aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (Wiratno, 2009).

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang peran pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan Solakoh (2020) dan Siti (2020) memiliki pengaruh negatif dan signifikan akan tetapi pada penilitan oleh Safrianto (2018) Cahyani (2020) memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang peran pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan Pangaribowo (2016) dan Faisal (2018) memiliki pengaruh Negatif akan tetapi pada penelitian oleh Siti (2020) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang peran pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan Rosa dan Sovita (2016) dan Yuli (2018) memiliki pengaruh Positif dan signifikan akan tetapi pada penelitian oleh Setyawan dan Ananda (2019) Siti (2020) memiliki pengaruh Negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang peran pengaruh TPAK terhadap ketimpangan pendapatan Hartono (2010) memiliki pengaruh Negatif dan signifikan, sedangkan Siti (2020) memiliki pengaruh Negatif dan tidak signifikan akan tetapi pada penelitian oleh Masruri (2016) dan Rahma (2018) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang kompleks (WorldBank, 2016). Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan umumnya faktor-faktor saling berkaitan satu sama lainnya. Sesuai dengan belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin

mengkaji lebih dalam lagi dalam tentang “Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan dengan permasalahan yang sama dalam penelitian ini, antara lain :

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan sebagai Latihan yang digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penelitian tentang determinan ketimpangan ekonomi.

##### **2. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai determinan yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Barat.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Determinan Ketimpangan Pendapatan di provinsi Sumatera Barat.

##### **4. Bagi Pemerintah Daerah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pemerintah dan instansi terkait untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat mengurangi atau menuntaskan masalah tersebut, terutama dalam kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat yang harus ditingkatkan kualitas nya untuk kedepan.